

SULITKAH KORUPSI DIBERANTAS: MOTIF AFILIASI DAN KEKUASAAN

Dedeng Yusuf Maolani¹⁾, David Ashari Kusmayadi²⁾,
Deden Hermawan³⁾ & Afifah Wulan Sri Maida⁴⁾

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹dedeng.ym@gmail.com, ²davidashari12@gmail.com, ³dheden1805@gmail.com,

⁴afifahwulansrimaida@gmail.com

Abstrak

Perilaku korupsi semakin marak terjadi bahkan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari segi kasus yang terjadi. Oleh karena itu untuk menurunkan kasus perilaku korupsi di pandang perlu mengentahui faktor apa saja yang menjadi motivasi para pelaku korupsi, sebagai langkah awal untuk memberantas tindak perilaku korupsi. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab motivasi terjadinya korupsi di lihat dari faktor internal dan eksternal menggunakan teori motivasi McClelland. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana Penelitian ini ingin mendapatkan data yang bersumber dari suatu pengamatan terhadap suatu perilaku. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini studi literatur dimana peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Faktor internal dan eksternal membuat para pelaku korupsi termotivasi di lihat dengan menggunakan teori McClelland. Dalam faktor internal yakni aspek perilaku individu aspek sosial. Sedangkan dalam aspek eksternal yakni sikap masyarakat itu sendiri terhadap tindak perilaku koruptif terbilang acuh, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek organisasi. Dengan ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yang membuat para pelaku korupsi termotivasi. Dengan ini sangat dibutuhkan kerja sama serta kesadaran dari semua *stake holder* terkait untuk bisa mengatasi dan memberantas perilaku korupsi dengan tujuan utamanya adalah menghilangkan perilaku korupsi ini.

Kata Kunci : *Korupsi, Faktor Internal, Eksternal*

Abstract

Corruption behavior is increasingly prevalent and even always increases from year to year in terms of cases that occur. Therefore, to reduce cases of corrupt behavior, it is necessary to know what factors are the motivations of the perpetrators of corruption, as a first step to eradicate acts of corruption. This study aims to find out the motivational causes of corruption in terms of internal and external factors using McClelland's motivation theory. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach. Where this research wants to get data that comes from an observation of a behavior. Data processing techniques in this study are literature studies where researchers collect data by searching and analyzing in various books, journals, media and other sources. The results showed that the existence of internal and external factors made the perpetrators of corruption motivated by using McClelland's theory. In internal factors, namely aspects of individual behavior, social aspects. Meanwhile, in the external aspect, namely the

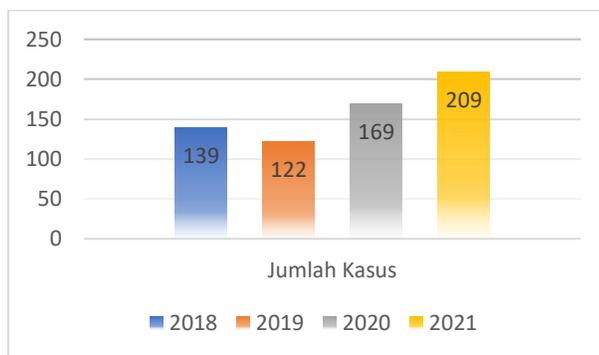
ARTIKEL

attitude of the community itself towards corruptive behavior, it is fairly indifferent, economic aspects, political aspects and organizational aspects. This shows that the internal and external factors that make the perpetrators of corruption are motivated. With this, cooperation and awareness from all relevant stakeholders is urgently needed to be able to overcome and eradicate corrupt behavior with the main goal of eliminating this corrupt behavior.

Keywords : Corruption, Internal Factors, External

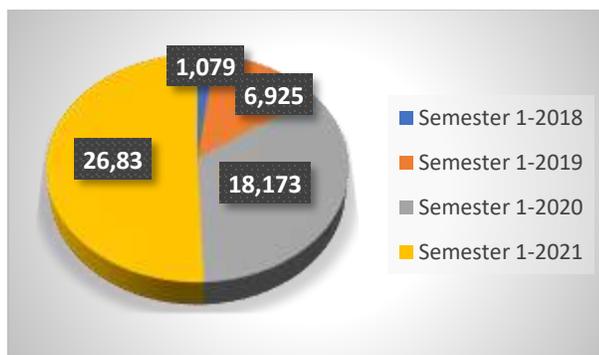
A. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia tentunya sudah sangat meresahkan. Karena hal ini sudah sangat sering terjadi baik yang terjadi di sektor publik maupun swasta. Fenomena korupsi ini menjadi masalah besar bukan hanya di Indonesia bahkan di negara maju pun demikian. Kasus demi kasus sudah semakin sering terjadi bahkan di tataran pejabat setingkat menteri pun masih ditemukan kasus korupsi.



Gambar 1.1 Angka Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2021
Sumber: ICW (*Indonesia Corruption Watch*), 2021

Bahkan menurut data dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) angka penindakan kasus korupsi semester 1 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah penindakan kasus korupsi selama 6 bulan pada awal tahun 2021 mencapai angka 209 kasus. Sedangkan pada 6 bulan awal tahun 2020 hanya 169 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 122 kasus. Serta pada 6 bulan awal tahun 2018 mencapai angka 139 kasus



ARTIKEL

Gambar 1.2 Jumlah Kerugian Negara Akibat Korupsi
Sumber: ICW (*Indonesia Corruption Watch*), 2021

Hal itu juga menyebabkan kerugian negara akibat korupsi mengalami kenaikan. Hal ini terjadi selama 4 tahun berturut-turut dimana kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi selalu mengalami kenaikan. Dimana pada 6 bulan awal tahun 2018 kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi mencapai 1,079 T, lalu pada 6 bulan awal tahun 2019 kerugian negara mencapai 6,925 T, pada 6 bulan awal tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp. 18, 173 T. Sedangkan pada 6 bulan awal tahun 2021 kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi mencapai Rp. 26, 83 T.

Melihat data diatas kasus korupsi menjadi sangat ironis karena sebagian pelaku merupakan orang yang secara status sosial berada pada status sosial yang tinggi. Bahkan upaya pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan pejabat ataupun pegawai negara melalui berbagai sistem diantaranya sistem remunerasi dan sistem merit yang terdapat pada reformasi birokrasi.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kasus korupsi yang terjadi saat ini. Hal ini bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar yaitu faktor ekonomi, politik dan sosial budaya. Faktor ekonomi sering dianggap menjadi faktor penyebab utama terjadinya korupsi ini. Faktor politik yang menjadi penyebab terjadinya korupsi ini biasanya dijelaskan pada hal demokrasi, keefektifan pemerintah dan desentralisasi. Sedangkan dalam hal sosial budaya hal yang menjadi sorotan adalah sejarah korupsi yang menjadi warisan kolonial, *ethnic diversity*, kualitas regulasi dan *urban population*. Dalam perspektif hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom, sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam perdebatan panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi dapat mendistorsi alokasi sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar ekonom memandang bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. (Winurini, 2017).

Menurut Blackburn (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian.

Dari pemaparan diatas, lalu yang menjadi permasalahan mengapa kasus korupsi ini sering terjadi di Indonesia dan pada realitanya selalu mengalami kenaikan dari segi kasus yang terjadi. Hal apa yang menyebabkan kasus korupsi ini belum bisa diatasi dengan baik. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia. Bahkan sebagian orang sudah menganggap korupsi ini sebagai budaya. Tetapi tentu saja itu adalah budaya yang buruk dan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat. Diharapkan dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca serta bisa membantu pemerintah agar bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan terkait perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah “PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI MOTIVASI” karya Sulis Winurini. Dimana pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu dalam hal membahas teori motivasi McClelland yang bisa menyebabkan korupsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian, hasil penelitian yang dilakukan Sulis Winuri lebih kepada solusi untuk menanggulangi motif afiliasi, kekuasaan dan motif prestasi agar tidak muncul tindak koruptif. Sedangkan dalam penelitian kami lebih

kepada mencari tahu penyebab motivasi terjadinya korupsi di lihat dari faktor internal dan eksternal menggunakan teori motivasi McClelland.

Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Sedangkan menurut Kartono, K (1983) korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum (Rachman, 2018).

Sementara itu korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa korupsi ini disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau kelompok. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Hartanti, 2008).

Teori Motivasi McClelland

Menurut (Kast dan Rosenzweig, 1970) motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Sementara itu dalam (Yorks, 1976) motivasi di definisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut McClelland (1961, 1975, 1985), ada 3 dorongan dasar yang yang memotivasi individu yaitu: kebutuhan afiliasi, kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan prestasi. Pada dasarnya kebutuhan afiliasi adalah keinginan untuk membina hubungan lebih dekat, bekerja sama, dan berteman, sedangkan kebutuhan kekuasaan adalah dorongan yang muncul untuk merasa lebih kuat dan adidaya daripada orang lain, dan kebutuhan prestasi adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih khususnya melebihi standar.

Sejalan dengan hal diatas Wu dan Huang (2011) dalam (Winurini, 2017) menemukan bahwa motif afiliasi dan kekuasaan memiliki hubungan langsung dengan perilaku suap sebagai bagian dari perilaku korupsi. Perantara hubungan antara motif afiliasi dengan perilaku suap yaitu keadilan distributif. Sedangkan perantara motif kekuasaan dengan perilaku suap yaitu peluang.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana peneliti ingin mendapatkan data yang bersumber dari suatu pengamatan terhadap suatu perilaku. Sementara itu Teknik pengolahan data dalam penelitian ini studi literatur dimana peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal,

media dan sumber-sumber lainnya. Selain itu peneliti juga mencari dasar untuk dijadikan sebuah pijakan melalui teori yang dirasa relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data ini berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai penyebab motivasi terjadinya korupsi di lihat dari faktor internal dan eksternal menggunakan teori motivasi McClelland yakni Motif Kekuasaan, Motif Afiliasi (Bersahabat) dan Motif Berprestasi. Adapun Uraian yang lebih rinci sebagai berikut :

Motif Kekuasaan, Afiliasi (Bersahabat) dan Berprestasi

Ada dua jenis tipe yakni pribadi dan kelembagaan dalam kebutuhan seseorang untuk berkuasa (Ferry Roen, 2012) . Hal ini sejalan dengan motif kekuasaan yang memang dapat menjadikan orang tersebut dapat mengendalikan orang lain. Kebutuhan kekuasaan ini sering di anggap sebagai sesuatu yang sangat di inginkan. Terlebih ketika di benturkan dengan kepentingan individu yang sifatnya pun hanya menguntungkan individu, katakanlah korupsi.

Mereka dengan kebutuhan afiliasi (bersahabat) membutuhkan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan perlu merasa diterima orang lain. Mereka pun cenderung menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok kerja mereka saja. Artinya dalam tindak korupsi pun sistem kerja yang di lakukan bertujuan untuk menjaga hubungan antar sahabat dengan melibatkannya.

Kebutuhan beprestasi ini bertujuan untuk terus unggul, karena dengan terus unggul dapat membuat dirinya di pandang memiliki performa kerja yang baik. Ketika sudah memiliki performa yang baik maka dapat lebih mudah menduduki tempat yang strategis, karena di anggap memiliki kompetensi yang baik. Dengan demikian motif kebutuhan berprestasi sangat di butuhkan dalam hal berperilaku koruptif.

Faktor Internal

Faktor yang muncul dari diri seseorang dapat masuk kedalam faktor internal. Adanya paradigma seseorang mengenai korupsi pasti berbeda. Karena belum adanya batasan mengenai istilah Korupsi menyebabkan bertahannya sikap primitif serta banyak muncul perbedaan padangan atau paradigma dalam melihat korupsi.

Ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam kacamata pandang psikologi, yakni teori medan dan teori big five personality. Teori medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (*personality*) dan lingkungan (*environment*) atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan (psikologis) yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait. Teori yang kedua adalah teori big five personality. Pengertian teori big five personality merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor kepribadian, yaitu *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, *openness*, dan *conscientiousness*. (Rachman, 2018). Namun yang menjadi fokus pembahasan peneliti di ruang internal yakni :

a) Aspek Perilaku Individu

- Tamak/Rakus Manusia

Sifat tamak dan rakus ini menjadi hal utama yang menyebabkan seseorang Korupsi. Seseorang korupsi bukan karena ingin menutupi kebutuhan primer tetapi memang karena memiliki sifat tamak, rakus serta hasrat untuk terus memperkaya diri sendiri. Maka adanya tindakan keras tanpa kompromi, hukumnya wajib.

- Moral yang kurang kuat

Hal ini bermula terhadap orang yang kurang kuat dan mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Latar belakang seseorang tergoda yaitu mulai dari pengaruh lingkungan sekelilingnya. Seperti, atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lainnya yang memberi kesempatan Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.

- Gaya Hidup yang Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif sendiri bermula ketika hidup dikota besar. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk bertindak konsumtif. Ketika perilaku konsumtif ini tidak didukung atau diimbangi dengan pendapatan yang sesuai maka akan menjadi peluang seseorang untuk melakukan tindak korupsi.

b) Aspek Sosial

Aspek sosial ini erat kaitannya dengan keluarga. Sebab keluarga dapat menjadi pendorong kuat seseorang untuk senantiasa berperilaku koruptif. Statement ini diperkuat oleh kaum bahvioris, bahwa lingkungan keluarga dapat menjadi pendorong terkuat seseorang bertindak korupsi. Hal ini mengalahkan sifat baik yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dan keluar dari karakter utama manusia itu sendiri. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Untuk memberantas korupsi, sistem hukum pemerintah di Indonesia sangat loyo. Artinya Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar, aparat mudah suap sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Politik Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi, karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.

Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih dalam hal ini terjadinya KKN. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Pernyataan ini telah di singgung sebelumnya dan diperkuat pula oleh teori McClelland bahwa kekuasaan menjadi motor yang menghantarkan kepada tindak korupsi. Sosial Lingkungan sosial pun dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada aspek-aspek yang membuat orang-orang melakukan korupsi. Aspek tersebut meliputi :

a) Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi

Demi menjaga nama baik organisasi nama individu sering ditutupi ketika berada didalam organisasi. Begitu pula dengan tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain, *Pertama* budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Dampaknya masyarakat menjadi tidak kritis. *Kedua* Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah Negara. Contohnya akibat

ARTIKEL

korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terganggu misalnya. *Ketiga*, Masyarakat kurang.

b) Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas dan salah satunya adalah korupsi.

c) Aspek Politik

Politik uang (money politics) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu.

d) Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.

ARTIKEL

Tabel 1. Motivasi dan Penyebab Korupsi

NO	KASUS	MOTIF	PENYEBAB	FAKTOR PENYEBAB
1.	2004 hingga 2017 tercatat terdapat 65 bupati atau wali kota dan 12 gubernur yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Fana Suparman, 2017)	Afiliasi & Prestasi	Politik & Ekonomi	(Internal) Aspek Individu (Eksternal) Aspek Ekonomi dan Organisasi
2.	Gubernur Sultra Nur Alam terjerat kasus korupsi. (ayomi amindoni, 2018)	Kekuasaan & Prestasi	Politik	(Internal) Aspek Individu (Eksternal)
3.	Tertangkapnya Djoko Tjandra membutuhkan waktu 11 tahun.	Kekuasaan, Prestasi dan Afiliasi	Politik	(Internal) Perilaku Individu. (Eksternal) Aspek Ekonomi, dan Organisasi

Sumber : Media Informasi

Chen et al (2008) dalam Studynya bahwa perilaku suap dapat menjaga hubungan pertemanan serta mengurangi kebencian (Steidimeter, 1999), sekaligus menciptakan kesepakatan jangka panjang (Millington et al., 2005), sehingga keberhasilan perusahaan dapat dipastikan. Temuan Wu dan Huang (2011) menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempengaruhi pegawai pemerintah ketika mereka memberikan suap. Temuan tersebut mendukung apa yang di gagas oleh Sanyal (2005) bahwa manfaat komersial dapat menyatakan bahwa manfaat komersial dapat di peroleh ketika perusahaan mempengaruhi pegawai pemerintah lewat suap. (Winurini, 2017)

Dengan adanya temuan Wu dan Huang (2011) menunjukkan bahwa adanya peluang suap ini telah menjalar secara massif karena adanya peraturan yang ambigu membuat meningkatnya intensi perusahaan untuk melakukan suap. Suap sendiri sudah menjadi bagian dari transaksi bisnis yang normal sebab sudah hampir semua orang melakukannya. Mengingat adanya hukum yang ambigu serta penegakan hukum yang lemah, maka suap akan terus terjadi secara signifikan. Pihak yang melakukan atau yang menerima suap sendiri akan merasa terfasilitasi dan akan terjadi secara terus menerus ketika kedua belah pihak (penyuap dan penerima suap) memiliki persepsi yang sama, berkenaan dengan benefit yang diterima dalam pertukaran tersebut.

Hasil study ini sejalan dengan perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Siswadi (2015:103) menggambarkan, korupsi di Indonesia dilakukan secara kolektif, melibatkan banyak pihak, bisa dari institusi yang sama, lintas institusi, pengusaha, termasuk keluarga pelaku itu sendiri. Sebagian besar kasus melibatkan pelaku dengan beragam profesi, seperti penyelenggara negara, politisi, penegak hukum, dan pengusaha. Ada peran

ARTIKEL

perantara dalam prosesnya, yaitu sebagai penghubung antara penerima dan pemberi suap. Dalam kasus-kasus tertentu, perantara bertugas sebagai makelar, yakni mencari pihak-pihak yang dijanjikan akan diuntungkan dalam suatu transaksi. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Djoko Tjandra yang alot, karena membutuhkan waktu 11 tahun lamanya untuk menangkap koruptor kelas kakap ini. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin saiman pada Kamis, 30 Juli 2020 sebagaimana Pikiran-Rakyat.com dikutip dari laman RRI. “ Dengan di tangkapnya Djoko Tjandra bisa menggali banyak hal, kalau memang nanti Pak Djoko Tjandra buka-bukaan terkait adanya uang atau jani bisa ditelusuri”. Bahkan sebelum tertangkapnya Djoko Tjandra, poliri sudah terlebih dahulu menetapkan dua orang tersangka diantaranya Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra yaitu Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

Nama Djoko Tjandra pun sempat hilang dalam daftar *red notice*, hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kasus tersebut. Pasalnya, dengan hilangnya nama Djoko Tjandra di *red notice* ini telah membuat namanya turut hilang dari daftar cekal Direktorat Jendral Imigrasi. Dengan adanya permasalahan ini maka dugaan suap dan gratifikasi kepada oknum-oknum aparat tersebut maupun tersangka lainnya yang ditetapkan, dengan ini dugaan tersangka lainnya akan merambah kemana-mana.

Berkaca pada kasus tersebut ada peran perantara dalam prosesnya, yaitu adanya penghubung antara Pemberi dan penerima suap. Dalam kasus tertentu, perantara ini bertugas sebagai makelar, yakni mencari pihak-pihak yang dijanjikan akan diuntungkan dalam suatu transaksi. Pada praktiknya, terdapat sejumlah pelaku yang melakukan korupsi tidak hanya sekali saja, tetapi berkali-kali. Hal ini terjadi diduga karena sebelumnya pelaku tidak merasakan efek jera tetapi justru lebih banyak merasakan kepuasan karena korupsi. Konformitas pun dapat menjadi faktor penyebab, yakni ketika masing-masing orang merasa bahwa korupsi merupakan hal yang biasa dilakukan. Situasi seperti ini menggambarkan besarnya peluang terjadinya korupsi di Indonesia.

E. SIMPULAN

Perilaku korupsi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari segi kasus yang terjadi. Banyak sekali faktor yang membuat para pelaku koruptor ini tidak pernah jera dan terus termotivasi untuk berperilaku koruptif. Hal ini dapat di lihat dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Dalam Faktor Internal dapat di lihat dari aspek, *Pertama* aspek perilaku individu dalam hal ini sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif. *Kedua* aspek sosial yang erat kaitannya dengan keluarga. Sedangkan dalam aspek eksternal yakni *Pertama* aspek sikap masyarakat itu sendiri terhadap tindak perilaku koruptif terbilang acuh, *Kedua* aspek ekonomi seperti Pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan, *Ketiga* aspek politik seperti *money politics* dan *Keempat* aspek organisasi seperti organisasi yang ikut andil dan mendukung terjadinya korupsi dengan membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Dengan ini dapat di lihat bahwa faktor internal dan eksternal yang membuat para pelaku korupsi termotivasi. Dengan ini sangat dibutuhkan kerja sama serta kesadaran dari semua *stake holder* terkait untuk bisa mengatasi dan memberantas perilaku korupsi dengan tujuan utamanya adalah menghilangkan perilaku korupsi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi amindoni. (2018, March 29). Kasus korupsi Gubernur Sultra Nur Alam menjadi “terobosan” KPK berantas korupsi sumber daya alam. Bbc.Com
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. LP2M.
- Engkus, E. (2017). The Influence Of organizational Behavior On Work Ethics Employees In Bandung Regency Government. International Academy of selence, Enggining and Tecnology, 1(1), 1-16.
- Fana Suparman. (2017, December 9). Mahalnya Biaya Politik Jadi Faktor Pendorong Korupsi di Daerah. Beritasatu.Com.
- Ferry Roen. (2012, October 31). Teori Tiga Motif Sosial. Perilakuorgnisasi.Com.
- Hartanti, E. (2008). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Irawan, B. (2011). Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi : Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas. MIMBAR, XXVII, 143–149
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Prathama, Z. A. dan A. G. (2015). Psikologi Korupsi. PT. Remaja Rosdakarya
- RB. Soemanto, Sudarto, S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. Yustisia, 3.
- Rachman, F. (2018). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Keadilan Progresif, 2
- Rohyani, E. (2010). Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Negara. Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan.
- Setiadi, E. (2010). Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana. *Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan*.
- Suryani, I. (2015). Peran Media Iklan Televisi Sebagai Media Kritik Sosial Kasus Korupsi (Studi Kasus Pada Iklan Djarum 76 Versi “Kontes Jin”). *Komunikasi*, 9.
- Winurini, S. (2017). PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI MOTIVASI. Info Singkat, IX